

Literasi Media di Era *Post Truth*

Media Literacy in the Post Truth Era

Bambang Mudjiyanto
Amri Dunan

Puslitbang Aptika dan IKP, Badan Litbang SDM, Kementerian Kominfo
Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
bamb037@kominfo.go.id, bambangmudjiyanto26@gmail.com;
amri007@kominfo.go.id
amridunan007@gmail.com

*Dikirim: 25 Desember 2020, Direvisi: 26 Desember 2020, Diterima: 28 Desember 2020,
Terbit: 31 Desember 2020*

*Sitasi: Mudjiyanto, B, Dunah, A, (2020). Literasi Media di Era Post Truth, PRoMEDIA.
Volume 6 (2), Desember 2020, hal 294 - hal 334*

Abstract

Framing of media messages through text, sound and images is a media activity to influence the thoughts and feelings of the audience. The relationship between media and audiences is built by media messages, whereas media messages are in themselves unique. Media literacy is intended to make media literate individuals who have an understanding and skills in access to, knowledge, and attitudes towards the media used. Media literacy is built to increase individual control over the media they use to send and receive messages. This social shift cannot be separated from the influence of the strengthening of the digital world where humans are connected to one another in a network called the internet. This condition makes information production no longer a monopoly on mainstream media but also social media managed by the public. The emergence of hoax news on social media, the post truth era is marked by media and journalism indecision, especially in dealing with fake statements from news sources. Post truth is an abnormality. Adapted societies, of course, still adhere to the values of truth and divine morality as shared values.

Keywords: Literacy, Media, Post Truth

Abstraksi

Pembingkaiian pesan media melalui teks, suara dan gambar merupakan aktivitas media untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan khalayak. Hubungan antara media dan khalayak dibangun oleh pesan media, sedangkan pesan media itu sendiri sesuatu yang khas. Literasi media dimaksud bertujuan menjadikan individu melek media yang memiliki pemahaman dan kecakapan atas akses, pengetahuan, dan sikap terhadap suatu media yang digunakan. Literasi media dibangun untuk meningkatkan kontrol individu terhadap media yang mereka gunakan untuk mengirim dan menerima pesan. Pergeseran sosial tak lepas dari pengaruh menguatnya dunia digital dimana manusia terkoneksi satu sama lain dalam jaringan bernama internet. Kondisi ini membuat produksi informasi tidak lagi menjadi monopoli media arus utama (*mainstream*) melainkan juga media sosial yang dikelola oleh masyarakat. Munculnya berita-berita hoaks di media sosial, era *post truth* ditandai dengan kebimbangan media dan jurnalisme khususnya dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong sumber berita. Post truth adalah sebuah ketidaknormalan. Masyarakat beradap, tentu masih berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan moralitas ke-Tuhan-an sebagai nilai bersama.

Kata Kunci: Literasi, Media, Post Truth

I. PENDAHULUAN

Merajalelanya penyebaran hoaks pada perhelatan Pemilu ikut menciptakan polarisasi ditengah masyarakat. Hoaks atau fitnah itu berlangsung intens bahkan sebelum ditetapkannya calon sebagai peserta Pilkada, disinyalir paling tinggi saat masa tenang. Pada kesempatan ini negara bisa memaksa platform media sosial untuk melakukan kontrol sosial.

Kontrol sosial merupakan suatu mekanisme untuk mencegah penyimpangan sosial serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap sesuai norma dan nilai yang berlaku. Adanya kontrol sosial yang baik diharapkan mampu meluruskan anggota masyarakat yang menyimpang. Kontrol sosial dapat menciptakan atau menjaga kedamaian dan ketentraman di masyarakat sehingga keteraturan sosial di masyarakat dapat terwujud.

Roucek dan Warren berpendapat bahwa kontrol sosial itu memiliki dua tipe, yaitu “formal social control” dan “informal social control”. Apabila ditinjau, maka pembagian pada dua tipe tersebut pada dasarnya membicarakan mengenai subyek, yaitu siapa yang melakukan pengawasan sosial. Di dalam tipe kontrol sosial formal (formal social control) pengawasannya dilakukan oleh negara atau badan-badan yang mempunyai kedudukan tetap, serta menggunakan prosedur yang tetap pula. Karakteristik dari padanya adalah bawah dalam melakukan pengawasan, digunakan peraturan-peraturan tertulis, dan sebagainya. Sedangkan kontrol sosial yang informal, menunjuk pada fungsi dan norma-norma sosial dalam mengawasi atau mengendalikan perilaku para warga masyarakat. Dalam kasus-kasus serius pengawasan dilakukan dengan paksaan, kekerasan atau dengan hukuman. Biasanya, masyarakat itu sendiri telah menyediakan sanksi-sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berkisar mulai dari ekspresi tidak senang sampai pada pangasingan dari

masyarakat, misalnya dengan memasukkan dalam lembaga pemasyarakatan (penjara) atau menghukum dengan hukuman mati atau hukuman lain seperti yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kontrol-sosial-atau-social-control>). Diakses, Tgl 13/6/2019.

Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Seseorang mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan seseorang. Seseorang menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Salah satu teori kontrol sosial yang paling handal dan sangat populer dikemukakan oleh Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep social bond. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan berbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/morality, dan seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. (Santoso dan Zulfa, 2013: 87-88).

Ide utama di belakang teori kontrol sosial adalah bahwa penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum atau memiliki dorongan untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, para ahli teori kontrol menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk menaati hukum. Hirschi, mengajukan beberapa proposisi teoritisnya, yaitu: (1) Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasi individu untuk bertindak konform terhadap aturan atau tata tertib yang ada; (2) Penyimpangan dan bahkan kriminalitas, merupakan bukti kegagalan kelompok sosial konvensional untuk mengikat individu agar tetap konform, seperti keluarga, sekolah atau institusi pendidikan dan kelompok dominan lainnya; (3) Setiap individu seharusnya belajar untuk konform dan tidak melakukan tindakan menyimpang atau kriminal; (4) Kontrol internal lebih berpengaruh dari pada kontrol eksternal. (Poloma, 2004:241).

Teori-teori kontrol sosial membahas isu-isu tentang bagaimana masyarakat memelihara atau menumbuhkan kontrol sosial dan cara memperoleh konformitas atau kegagalan meraihnya dalam bentuk penyimpangan. (Hagan, 2013: 236). Teori kontrol sosial merupakan perspektif yang terbatas untuk menjelaskan delinkuensi dan kejahatan. Teori ini meletakkan

penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu atau ikatan sosial dengan masyarakat, atau macetnya integrasi sosial. Kelompok yang lemah ikatan sosialnya cenderung melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan konvensional. Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya baik. (<http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf>). Diakses, Tgl 14/6/2019.

Penyebaran informasi bohong perlu diwaspadai karena dilakukan secara terorganisasi dan dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi bohong. Oleh sebab itu, masyarakat bertabayun dan tidak menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Ada empat komponen yang bisa menyebabkan Pilkada menjadi lebih panas seperti Pilkada di DKI Jakarta. Pertama, agama yang dianut salah satu calon; Kedua, kekerasan yang dipicu perbedaan kesukuan; Ketiga, cara berkomunikasi salah satu calon yang dianggap tidak nyaman oleh sebagian masyarakat; Keempat, perbedaan yang sangat tajam dari partai pendukung calon (Media Indonesia, 12/3/2018. Hal. 4).

Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) merilis hasil survei tentang wabah berita bohong (hoaks) nasional pada 13

Februari 2017. Survei yang dilakukan online terhadap 1.116 responden dalam waktu 24 jam dan disebarikan ke publik pada 7 Februari 2017 itu. Hasilnya hampir mayoritas masyarakat menyatakan sangat terganggu atas keberadaan hoaks. Sebanyak 75,90% masyarakat juga mengaku sangat setuju bahwa hoaks telah mengganggu kerukunan. Bahkan 70,20% masyarakat juga sangat setuju jika hoaks telah mengganggu pembangunan (Koran Sindo, 27/2/2017, Hal. 3).

II. PEMBAHASAN

A. Keluarga Ramah Gawai

Tak dapat dipungkiri, keluarga berperan penting menjadikan ‘rumah belajar’ yang tidak sekedar mengajarkan pengetahuan kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Pada titik ini anggota keluarga terutama Bapak dan Ibu harus bisa menjadikan keluarga ramah gawai. Sudah terlalu banyak korban penggunaan gawai tanpa pengelolaan dan bimbingan yang memadai, hanya mengonsumsi berita hoaks (bohong), palsu, ujaran kebencian, pornografi anak, bahkan perundungan siber. Maka dari itu, sebagai lingkungan pertama untuk mencerdaskan bangsa, keluarga harus ramah gawai dan orang tua harus paham posisi mereka. Dengan kata lain, keluarga tidak sekedar menjadi ‘madrasah pertama’, tapi juga harus menjadi ‘madrasah utama’ bagi anak-anak.

Orang tua sebagai kepala keluarga agar mampu berperan memberikan pemahaman kepada anak-anaknya jika menerima

informasi lewat media sosial yang belum pasti kebenarannya dan tidak jelas sumbernya.

Saat menerima informasi, masyarakat malas untuk membaca secara utuh, menyaring, memilah, mengendapkan, mengecek, apalagi menggugat keakuratan dan kebenarannya. Namun, di sisi lain, mereka gagal menahan hasrat atau tergesa-gesa menyebarkan informasi secara luas melalui media sosial dengan harapan dianggap sebagai yang terdepan.

Menurut Varis (1997:2-3) yang memfokuskan kajiannya pada perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, ada dua persoalan yang pada masa depan akan terasa mendominasi. *Pertama*, peningkatan secara eksponensial jumlah informasi dan komunikasi pada masyarakat informasi global yang sedang berkembang; dan *kedua* pengetahuan menjadi sumber daya yang sangat penting dalam ekonomi informasi global. Dalam perkembangannya, umat manusia harus memiliki kompetensi media yakni orang yang melek media sebagai hasil pendidikan media. Literasi sejalan dengan perkembangan teknologi komunikasi yang menjadi serana bagi umat manusia untuk menyimpan dan menyampaikan informasi kepada manusia atau kelompok manusia lain.

Berdasarkan statistik pengguna internet Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) mengklasifikasikan sembilan kategori usia dari anak-anak hingga orang tua. Hasilnya, generasi produktif umur 25-29 tahun teratas dengan jumlah 24 juta.

Angka 24 juta tersebut disaingi pengguna internet di kisaran usia 35-39 tahun. Kemudian disusul 30-34 tahun mencapai 23,3 juta. Di bawahnya usia 20-24 tahun (22,3 juta), 40-44 tahun (16,9 juta), 15-19 tahun (12,5 juta), 45-49 tahun (7,2 juta), 50 tahun ke atas (1,5 juta), dan 10-14 tahun dengan 768 ribu. Dari data tersebut tampak anak-anak usia 10-14 tahun telah menjadi bagian dunia gawai dan internet. Bisa dipastikan, masa depan mereka dalam bahaya jika waktu mereka habis digunakan untuk berselancar di dunia maya tanpa pengawalan yang baik.

Tantangan yang dihadapi manusia dikaitkan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, khususnya dalam bidang literasi agar seseorang bisa berhasil dalam kehidupan pada abad ke-21, para pakar pendidikan, bisnis dan pejabat pemerintah melakukan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di Berlin Jerman pada 7-8 Maret 2002 yang diberi nama *21st Century Literacy Summit*. KTT ini mengidentifikasi standar-standar literasi untuk abad ke-21. Buku putih itu menyebutkan literasi abad ke-21 yang lebih dari sekedar literasi tradisonal yang berbasis membaca, menulis, matematika dan ilmu pengetahuan. Literasi memasukkan komponen-komponen untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan berpikir kritis manusia dengan memadukan perkembangan sosial, profesional dan teknologi, yaitu: (1) Literasi teknologi: kemampuan untuk memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses dan mengomunikasikan informasi secara efektif; (2) Literasi informasi: kemampuan untuk mengumpulkan,

mengorganisasikan, menyaring dan mengevaluasi informasi dan untuk membentuk opini yang kokoh berdasarkan kemampuan tersebut; (3) Kreativitas media: kapasitas individu yang terus berkembang dimanapun untuk membuat dan menyebarkan konten pada berbagai khalayak; dan (4) Tanggung jawab dan kompetensi sosial: kompetensi untuk memperhitungkan akibat-akibat sosial dari publikasi *on-line* dan tanggung jawab terhadap anak-anak (Bertelsman & AOL Time-Warner, 2002:13).

Penetrasi internet dengan begitu leluasa masuk ke genggam tangan anak didik ialah sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan. Merujuk data dari BPS (2017), persentase siswa umur 5-24 tahun yang mengakses internet selama tiga bulan terakhir (selama 2017) mencapai 40,96%. Siswa yang tinggal di perkotaan hampir dua kali lebih besar menggunakan internet jika dibandingkan dengan yang tinggal di pedesaan. Di sisi lain, menurut laporan tersebut, ada peningkatan meningkatnya persentase siswa umur 5-24 tahun yang mengakses internet seiring dengan meningkatnya kuintil pengeluaran dan jenjang pendidikan yang diikuti. Laporan tersebut juga menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka mengakses internet untuk mengerjakan tugas sekolah dan aktivitas sosial media/jejaring sosial (Media Indonesia, 10/4/2018. Hal. 8).

Sementara itu, riset Kementerian Komunikasi dan Informatika serta UNICEF mengenai perilaku anak dan remaja dalam menggunakan internet juga harus diperhatikan. Berdasarkan

survei terhadap 2.500 orang tua di Singapura, Thailand, Indonesia, Malaysia, dan Filipina, beberapa temuan yang menarik ialah 98% responden memperbolehkan anak menggunakan ponsel pintar/tablet (*Kominfo.go.id*, 18/2/2014). Data itu menunjukkan, kebanyakan orang tua masih belum memahami betapa gawai bisa merugikan anak jika tidak dikelola (*Media Indonesia*, 9/4/2018. Hal. 8).

Di era banjir informasi ini, yang beragam informasi berkaitan antara fakta dan fiksi, antara kebenaran dan kebohongan. Ketika informasi begitu mudah dimanipulasi atas beragam alasan dan kepentingan. Pada saat kebencian begitu dibudidayakan dan segala sesuatu dianggap sebagai kebenaran ketika sesuai dengan selera, selera kelompoknya, yang berbeda harus menyingkir, lenyap dari pandangan.

Jenis media yang dominan dikonsumsi ikut memengaruhi persepsi yang terbentuk dalam merespons perubahan sosial. Responden yang lebih banyak mengonsumsi media sosial cenderung memandang keadaan lebih negatif dibandingkan dengan responden yang lekat pada pers. Lebih dari sepertiga konsumen utama media sosial juga cenderung memandang pesimis terhadap masa depan bangsa. Sementara kurang dari sepertiga bagian responden konsumen pers yang berpikir serupa (*Kompas*, 6/2/2017. Hal 5).

Pengelolaan penggunaan gawai tidak berarti keluarga harus antigawai, tapi penggunaan gawai harus dibatasi, dikawal serius

dalam rangka menyelamatkan anak-anak dari konten negatif di internet. Penggunaan gawai pada anak-anak, pelajar dan mahasiswa harus dikelola dengan baik, apalagi anak-anak dibawah umur seharusnya menghabiskan waktu mereka untuk belajar, membaca buku, atau bermain layaknya anak-anak. Dalam praktiknya, saat berada di rumah, sering kali kita menemukan anak-anak yang menghabiskan waktu dengan bermain gawai tanpa ada kontrol dan batas tertentu sehingga mereka menjadi generasi yang sangat bergantung atau bahkan menunjukkan gejala kecanduan gawai. Dalam situasi semacam ini, keluarga seharusnya menjadi pemutus mata rantai pertama terhadap penggunaan gawai berlebihan.

Literasi media memberikan pemahaman bahwa kemampuan dan keterampilan itu sangat penting dan relevan dengan kebutuhan kekinian (*zaman now*). Salah satu batasan tentang literasi media dapat dibaca dari rumusan Aspen Media Literasi Leadership Institute (1992), literasi media ialah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan membuat media dalam berbagai bentuk.

Polemik dari perkembangan kebebasan di era global seperti sekarang ini menuntut setiap individu untuk eksis di lingkungan mereka. Hal ini ditambah perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju tak terduga lagi. Berbagai produk dari kebebasan informasi tersebut bisa kita lihat belakangan ini. Segala jenis dari aplikasi media sosial berkembang dari berbagai macam.

Semua lapisan masyarakat sudah tak bisa dilepaskan lagi dari peran media sosial didalam kehidupan sehari-hari. Entah sebagai ajang eksistensi atau sebagai gaya hidup modernitas seperti sekarang. Sampai-sampai setiap individu bisa mempunyai beberapa akun dari berbagai media sosial. Hal ini sebagai kesadaran individu itu sendiri untuk tetap eksis di zaman yang semakin modern seperti saat ini.

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk segala produk dari kedua jenis perangkat kemampuan tersebut tidak dibarengi dengan kemampuan intelektual individu atau manusia itu sebagai *user* berbagai macam teknologi tersebut. Kesenjangan ini selain menimbulkan berbagai permasalahan juga sebagai andil yang cukup besar terhadap penggunaan yang tak sesuai dengan aspek berdirinya sosial media itu sendiri.

Peran aktif kaum intelektual amat diharapkan dalam menjaga bangsa Indonesia dari kabar-kabar bohong yang ingin mengganggu persatuan dan kesatuan di antara masyarakat. Perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar, tetapi jangan jadikan perbedaan itu untuk memfitnah dan memutarbalikkan isi berita. Semua pihak mengedepankan klarifikasi dan tidak mudah mempercayai kabar yang tidak jelas kebenarannya.

Akibat kurangnya kemampuan individu dalam menggunakan media sosial yang baik dan benar, permasalahan yang melibatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam nafsu buruk manusia pun timbul seiring dengan peran dari media sosial

yang cukup besar. Kelemahan masyarakat dalam literasi digital membuat berbagai berita-berita hoaks bertebaran memenuhi laman media sosial yang ada sehingga yang terjadi seperti pepatah bahwa sesuatu informasi atau berita bohong apabila dikonsumsi setiap hari yang terjadi ialah kaburnya bukti bahwa berita itu benar atau salah sehingga berita hoaks akan menemui para konsumen mereka yang lemah akan kemampuan dalam literasi digital.

B. Kesenjangan Intelektual Individu

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi termasuk segala produk dari kedua jenis perangkat kemampuan tersebut tidak dibarengi dengan kemajuan intelektual individu atau manusia itu sebagai user berbagai macam teknologi akan menimbulkan kesenjangan. Kesenjangan ini selain menimbulkan berbagai permasalahan juga sebagai andil yang cukup besar terhadap penggunaan yang tak sesuai dengan aspek berdirinya sosial media itu sendiri. Akibat kurangnya kemampuan individu dalam menggunakan sosial media yang baik dan benar, permasalahan yang melibatkan teknologi dalam nafsu buruk manusia pun timbul seiring dengan peran dari sosial media yang cukup besar.

Intelektual merupakan suatu karunia yang dimiliki individu untuk mengembangkan dan mempertahankan hidupnya. Perkembangan intelek di dunia psikologi maupun pendidikan dikenal dengan istilah perkembangan kognitif. Perkembangan

kognitif manusia merupakan proses psikologis yang didalamnya melibatkan proses memperoleh, menyusun dan menggunakan pengetahuan serta kegiatan mental seperti berfikir, menimbang, mengamati, mengingat, menganalisis, mensintesis, mengevaluasi dan memecahkan persoalan yang berlangsung melalui interaksi dengan lingkungan.

(<https://jihannabillanet.wordpress.com/2016/06/26/perkembangan-intelektual/>). Diakses, Tgl 17/6/2019.

Intelektual adalah proses kognitif, proses berfikir, daya menghubungkan, kemampuan menilai, dan kemampuan mempertimbangkan dan juga merupakan kemampuan mental atau intelegensi. (Chaplin, 1981: 5). Intelektual individu berkembang sejalan dengan interaksi antara aspek perkembangan yang satu dengan aspek perkembangan yang lainnya dan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya begitu juga dengan alamnya. Oleh karena itu, individu mempunyai kemampuan untuk belajar dan meningkatkan potensi kecerdasan dasar yang dimiliki.

Intelektual merupakan kemampuan untuk memperoleh berbagai informasi, berfikir abstrak, menalar, serta bertindak secara efisien dan efektif. Selain itu juga, intelektual kemampuan yang dibawa individu sejak lahir, intelektual tersebut akan berkembang bila lingkungan memungkinkan dan kesempatan tersedia sehingga dapat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap situasi baru.

Kelemahan masyarakat dalam literasi digital membuat berbagai berita-berita hoaks bertebaran memenuhi laman media sosial yang ada sehingga yang terjadi seperti pepatah bahwa sesuatu informasi atau berita bohong apabila dikonsumsi setiap hari membuat kaburnya bahwa berita itu benar atau salah. Itu membuat berita hoaks akan menemui para konsumen mereka yang lemah akan kemampuan dalam literasi digital. Masyarakat kini hidup di *era post truth*, yang menurut *Oxford Dictionaries*, fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat emosional dan pribadi. Oleh karena itu, kebenaran wajar saja apabila masyarakat Indonesia masih mudah untuk dikelabui dengan berbagai informasi yang notabene hoaks.

Kepercayaan akan suatu informasi pada era sekarang tidak didasarkan akan suatu kebenaran atau fakta yang disajikan. Sikap suka dan tidak suka lebih kepada diri manusia itu sendiri. Wajar saja bila hoaks menjadi suatu informasi viral di tengah dunia media sosial. Narasi kebencian yang dibawa berita-berita hoaks lebih kepada kecondongan akan individu atau kelompok tertentu sehingga hal itu bisa mematikan karakter orang atau kelompok tersebut. Hal seperti ini akan mematikan sikap dan nalar kritis akan sesuatu berita yang masuk kepada kita.

Gempuran informasi yang telah menerpa masyarakat setiap harinya seharusnya bisa membuat pribadi-pribadi belajar akan masalah yang sudah dihasilkan dari gejala tersebut. Istilah

berhenti untuk beternak kebencian menjadi hal yang perlu digiatkan kepada masyarakat untuk menghindari saling *share* suatu berita yang belum diketahui asal usul kebenaran berita tersebut.

Survei menunjukkan orang Indonesia sering hanya membaca judul tanpa melihat isinya. Sekitar 70% berita yang viral di media sosial disebar pengguna hanya karena judul yang provokatif dan sensitif (Media Indonesia, 10/11/2017. Hal. 22). Padahal, sering kali judul dan isi itu tidak sesuai. Orang yang terpinggirkan paling gampang termakan hoaks dan mudah menyebar hoaks. Hal itu diperparah dengan algoritma aplikasi media sosial. Dengan algoritma tersebut seseorang selalu disuplai informasi berdasarkan ketertarikan semata. Jadi, jika orang tersebut *me-like* atau membagikan konten Sara, suplai informasi yang akan didapatnya hanya berkisar di isu tersebut.

Budaya masyarakat Indonesia yang selalu terhubung dengan internet membuat pengakses tergoda untuk cepat berkomentar tanpa berpikir serius apa akibatnya. Euforia keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat membuat masyarakat kebanjiran informasi. Hoaks dan berita bohong dianggap menjadi fakta karena masyarakat malas bernalar dan verifikasi, hal ini dapat berbahaya bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah perlunya literasi informasi bagi masyarakat Indonesia dan mengklarifikasi informasi yang diterima.

C. Era *Post Truth*

Era digital ditandai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terus berlangsung dan berkembang begitu cepat, dimulai antara lain dari penemuan bluetooth (2001), Mozilla (2002), Skype (2003), MySpace (2003), Facebook (2004), Youtube (2005), Twitter (2006), Apple iPhone (2007), Google Android (2008), Apple iPad (2010), Instagram (2010), Google Glass (2012), Google Driverless Car (2012), Sophia the artificial intelligence robot (2015), Tesla Model 3 (2016), ke depan diprediksi akan terus berkembang inovasi teknologi baru lainnya.

Perkembangan digital dengan masifnya penggunaan internet sebagai media baru, membawa konsekuensi pergeseran karakter khalayak menjadi audience, khalayak tidak lagi obyek pasif, namun dapat berperan menjadi produsen informasi (prosumer) dan dapat membentuk opini publik via platform media sosial. Melalui media sosial memungkinkan pengguna berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi yang membentuk ikatan sosial secara virtual dalam masyarakat jejaring (*networking society*) yang ditandai dengan munculnya jurnalisme warga (*citizen journalism*), fenomena ini menempatkan media sosial sebagai garda terdepan dalam komunikasi model baru sekaligus berperan membentuk opini publik. Lebih ekstrim Aylin Manduric dalam tulisannya “*Social Media as a tool for information warfare*” menyatakan bahwa media sosial sebagai senjata pemusnah massal dan pemicu timbulnya konflik, berperan sebagai senjata kata-kata yang mempengaruhi

hati dan pikiran audiens yang ditargetkan. Melalui media sosial, berbagai informasi membanjiri ruang publik media sosial, arus informasi yang deras tanpa batas tersebut, ibarat sekeping mata uang logam yang memiliki dua sisi yang berbeda, media sosial satu sisi dapat bersifat positif apabila dimanfaatkan secara benar, untuk mendukung masyarakat dan mengoptimalkan manfaat praktis media sosial, bagi peningkatan pembangunan bangsa. (<http://ksp.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/index.html>). Diakses, Tgl. 18/6/2019.

Digitalisasi proses komunikasi dan diseminasi informasi memungkinkan setiap orang yang terakses internet masuk dalam arus informasi yang berjalan. Ketika perang strategi untuk memenangi pilkada mendominasi wacana yang berkembang di ruang komunikasi maya, warga pengguna internet cenderung tersedot mengikutinya.

Disisi lain kita memasuki hidup di era *post truth*, yang menurut *Oxford Dictionaries*, fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik jika dibandingkan dengan sesuatu yang bersifat emosional dan pribadi. Oleh karena itu, kebenaran wajar saja apabila masyarakat Indonesia masih mudah untuk dikelabui dengan berbagai informasi yang notabene hoaks. Kepercayaan akan suatu informasi pada era sekarang tidak didasarkan akan suatu kebenaran atau fakta yang disajikan. Sikap suka dan tidak suka lebih kepada diri manusia itu sendiri, wajar

saja hoaks menjadi suatu informasi viral di tengah dunia media sosial (Media Indonesia, 26/3/2018. Hal. 9).

English Oxford Dictionary mendefinisikan pasca kebenaran (*post truth*) sebagai “berkaitan atau menunjukkan keadaan saat fakta obyektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan kepercayaan pribadi”. Ralph Keyes dalam buku *The Post Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life* (2004) menyatakan era ini ditandai dengan kebenaran diganti dengan yang sekedar dapat dipercaya. Manipulasi kreatif dalam kebohongan dilakukan, termasuk penggunaan eufimisme (misalnya kata “gusur” diganti dengan “geser”). Data yang diinginkan dipotong, dipilih, disunting untuk suatu kesimpulan yang diinginkan pelaku bagi pendengarnya. Dusta pun berganti dengan istilah yang indah: “kebenaran alternatif” atau “fakta alternatif” (Kompas, 28/4/2018. Hal. 7). Oxford Dictionaries melacak asal muasal istilah *post truth* dan menemukan fakta bahwa seorang penulis keturunan Serbia bernama Stave Tesich memakainya pertama kali dalam sebuah esai di tahun 1992 tentang skandal Iran-Contra dan Perang Teluk. Secara sederhana, *post truth* digunakan ketika fakta-fakta tidak lagi relevan dalam politik.

Di era pasca kebenaran (*post truth*) ini, perbedaan penulis (*writers*) dan *author* semakin terang (*distinctive*). Penulis banyak yang mungkin belum dianggap *authoritative*, artinya mereka bisa saja menulis apa yang diketahui, tapi mereka belum memiliki

otoritas terhadap pemikiran atau ranah yang ditulisnya, sedangkan *author* ialah penulis yang sekaligus memiliki otoritas terhadap keilmuan/pemikiran yang dituangkan dalam tulisan baik itu dalam format buku, jurnal ilmiah, maupun tulisan lainnya. Setiap kalimat yang digoreskan (*authors*) melalui pena selalu akan dipertanggungjawabkan sebagai perwujudan integritas diri sebagai seorang ilmuwan/cendekiawan.

Di era *posttruth* yang ditandai dengan membludaknya informasi berkualifikasi berita palsu (*fake news*), nirfakta, *anonymous*, dan *unauthoritative*-dapat disaksikan juga bagaimana masyarakat di negara-negara maju sekali pun, ternyata dapat dengan mudah termakan berita dan informasi palsu, yang dapat menggerus dan menggoyahkan nilai-nilai demokrasi dan tatanan sosial dan ekonomi yang selama ini sudah terbukti mampu menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Jika negara-negara maju saja bisa terkena imbas pasca kebenaran dengan dampak cukup serius. Dampak *post truth* sekarang ini telah merasuk hampir ke setiap sudut ruang dan relung kehidupan masyarakat.

Media sosial menjadi saluran penyebaran berita hoaks. Riset distribusi hoaks di media sosial 2018 memaparkan saluran terbanyak penyebar berita bohong dijumpai di media sosial yaitu di laman Facebook sebanyak 82%, disusul Whatsapp 57% dan sebanyak 29% dari Instagram. Riset dilakukan terhadap 2.032 responden yang menggunakan telepon genggam di penjuru Indonesia. (<https://teknologi.bisnis.com/read/20180914/105/838292/penelitian-facebook-saluran-tertinggi-penyebaran-hoax>). Diakses Tgl 18/6/2019.

Penelitian mengungkapkan sebagian masyarakat di Tanah Air ternyata belum mampu mendeteksi berita bohong (hoaks). Akibatnya banyak warga yang masih terpengaruh oleh berita tersebut. DailySocial.id. (14/9/2018). Masih banyak warga yang belum mampu mencerna informasi dengan benar dan sepenuhnya, tetapi memiliki keinginan untuk segera membagikannya dengan yang lain, khususnya melalui laman sosial yang banyak digunakan saat ini. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil riset yang menyatakan bahwa 72% responden memiliki kecenderungan untuk membagikan informasi yang bagi mereka adalah penting, tetapi hanya sekitar 55% dari responden yang memverifikasi keakuratan berita. Oleh sebab itu, hoaks adalah suatu permasalahan yang dihadapi masyarakat, media dan pemerintah saat ini.

Model pemberitaan berita palsu (*fake news*) sangat beragam, bisa ungkapan berupa ‘ancaman’ yang menakutkan seolah-olah suatu peristiwa/hal yang terjadi. Sebaliknya berita itu bisa juga disajikan berbentuk harapan yang indah, tapi palsu. Rasanya masih hangat dalam ingatan kita bersama bagaimana kejadian-kejadian yang berlangsung di eropa Barat dengan peristiwa *Brexit*, dan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Kedua peristiwa itu menurut banyak pengamat merupakan kesuksesan *post truth* terbesar abad ke-21 ini. Dampaknya menjadikan suhu politik meninggi dan perbuatan kriminal semakin meningkat dan dirasakan masyarakat di kedua wilayah itu, termasuk masyarakat yang bermukim di negara-negara tetangga (Media Indonesia, 9/4/2018. Hal. 8).

Setidaknya ada tiga kondisi yang mendukung tumbuhnya era pasca kebenaran saat ini. *Pertama*, pada level filosofis, berkembangnya pemikiran-pemikiran pasca modern yang

mengugat obyektivitas, universalitas kebenaran, kemapanan konsep kebenaran klasik sebagai kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Manusia seolah-olah dihadapkan pada banyak jenis kebenaran sehingga berkata benar, benar versi siapa? *Kedua*, dukungan keberadaan teknologi yang mempermudah penciptaan teks/gambar/video, menggandakan, memanipulasi, menyunting, dan menyebarkan secara masif melalui internet. Setiap orang dapat menjadi pembuat dan penyebar berita saat ini.

Ketiga, pola pikir masyarakat pelaku sendiri yang ditandai budaya instan: ingin berhasil, sukses, terkenal, tampil secara mudah/cepat atau ingin segera menyelesaikan masalah yang kompleks atas perasaannya yang tidak aman, terancam, teraniaya sehingga sering kali jalan yang ditempuh adalah cara instan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini proses berpikir yang ketat dan sulit pun sering diabaikan (Kompas, 28/4/2018. Hal. 7).

Berbohong karena banyak yang percaya sudah tak lagi dianggap berbohong dan tidak lagi menimbulkan rasa malu/berdosa, bahkan jika itu digunakan atas nama agama. Segenap kesalahan/keburukan tertutupi dengan emosi dan kepercayaan massa sehingga fakta obyektif menjadi kurang memiliki pengaruh.

Masyarakat ataupun hukum sepertinya tidak dapat berbuat apa-apa dan menelan itu semu karena massa yang percaya padanya juga banyak jumlahnya. Sesat pikir ini dalam logika disebut

sebagai *argumentum ad populum* “dianggap benar” karena yang percaya banyak, dengan didukung penyebaran masif oleh industri hoaks.

Era pasca kebenaran justru menggantikan dasar peradaban dan negara yang sehat, yakni kepercayaan dengan dasar yang rapuh yang dipenuhi kecemasan dan kecurigaan. Ketika Indonesia terus dihadapkan dengan fantasi sebagai fakta, masyarakat akan kehilangan landasannya dalam kenyataan, saling curiga serta terpecah belah yang akan merugikan secara politik dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Media sosial telah menjadi sarana komunikasi masyarakat, termasuk menyalurkan aspirasi politik. Meskipun begitu, pesan-pesan yang disampaikan tidak jarang berupa berita bohong atau hoaks yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Penyebaran berita fitnah dan bohong atau hoaks merupakan hal yang sangat dilarang dalam semua penganut agama.

Maraknya produsen hoaks di jagat dunia maya Indonesia tidak lepas dari kurangnya budaya kritis di masyarakat. Untuk itu semua pemangku kebijakan mampu secara konsisten memberikan literasi digital ke seluruh masyarakat, terutama kepada generasi muda yang merupakan pengguna asli dunia digital (*digital native*). Pendidikan literasi digital harus diberikan menyeluruh dan sejak dini sehingga tidak sepotong-sepotong, misal hanya membahas terkait kebebasan berekspresi, toleransi, antihoaks, dan ujaran kebencian. Perlu dipahami bagaimana sifat dan hakikat media

sosial serta bagaimana masyarakat bersikap di dalamnya (Kompas, 24/3/2018. Hal. 4).

Sebuah komoditas, misalnya informasi, secara teoritis, tidak akan laku dan dibeli konsumen jika tidak menawarkan nilai guna atau manfaat yang bisa dirasakan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Informasi bohong yang dikemas dan ditawarkan kelompok tertentu niscaya tidak akan laku dipasaran jika tidak ada konsumen yang memang membutuhkannya. Sebuah komoditas dikatakan memiliki nilai guna yang lebih tinggi jika komoditas itu menawarkan manfaat yang dibutuhkan masyarakat konsumen. Untuk menuntaskan penanganan kasus jual-beli informasi bohong untuk kepentingan ekonomi atau politik, kasus ini harus diusut hingga tuntas dan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang kasus yang sama. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana membentengi masyarakat agar tidak mudah menjadi korban penyebarluasan informasi bohong.

Ada dua cara untuk meredam maraknya informasi hoaks. *Pertama*, meningkatkan literasi kepada masyarakat agar nantinya dapat lebih siap menghadapi propaganda dari pihak-pihak yang tak bertanggung jawab; *Kedua*, meningkatkan pengendalian terhadap konten-konten yang melanggar UU (Media Indonesia, 1/3/2018. Hal. 6). Masyarakat untuk lebih bijaksana dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial maupun aplikasi percakapan. Masyarakat pun harus jeli memilih berita yang sesuai dengan fakta serta berita bernada provokatif atau hoaks.

Ujaran kebencian dan hoaks masih tumbuh subur di Tanah Air antara lain karena masih adanya sebagian prasangka masa lalu yang tidak pernah tuntas penyelesaiannya. Fakta dan duduk persoalannya tidak bisa terurai secara jernih. Ditambah, berbagai prasangka tersebut selama orde baru malah dijadikan semacam ‘takhyul’ atau ‘mitos’ dan juga dijadikan sebagai alat untuk menstigmatisasi suatu kelompok atau lawan politik rezim penguasa. Nah, residu persoalan tersebut terbawa sampai hari ini. Kemudian kekuatan politik merekayasa hal-hal ini untuk kepentingan politik atau memukul lawan politik (Media Indonesia, 3/3/2018. Hal. 2). Masyarakat juga ikut andil dan mudah terbujuk oleh ujaran kebencian karena faktor kesenjangan sosial dan masih rendahnya kesejahteraan. Sejumlah elite kemudian ‘menyalahkan’ kelompok-kelompok lawan politik sebagai kambing hitam ketimpangan atau ketidakadilan sosial tersebut. Disamping itu, pada dasarnya masyarakat Indonesia itu juga memiliki tingkat literasi yang masih rendah, Akibatnya, mereka mudah percaya dengan gosip serta tidak kritis terhadap suatu isu. Situasi ini akan diperburuk kalau hukuman atau penindakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian juga lemah. Jadi perpaduan akar historis, kondisi masyarakat dan rekayasa elit politik menjadikan hoaks dan ujaran kebencian tersebut tumbuh subur di Tanah Air.

Penegakan hukum oleh aparat mampu mengatasi masalah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian dalam jangka pendek.

Namun, untuk jangka panjang, pemerintah perlu menuntaskan terlebih dahulu akar persoalan, memperbaiki ketimpangan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta memperbaiki tingkat literasi media di masyarakat.

Kata kunci penting untuk mencegah agar hoaks, tak mudah memengaruhi masyarakat adalah melalui literasi informasi dan literasi kritis. McLaughlin dan DeVoohd (2004) menyatakan literasi kritis adalah kemampuan dimana pembaca sebagai partisipan aktif dalam pembacaan dan menjadikan praktik tersebut bergerak melampaui kepasifan menuju penerimaan pesan teks dengan disertai pertanyaan, pengujian atau mengaitkan dengan suatu kekuasaan yang hadir di antara pembaca dan penulis.

D. Literasi Kritis

Ada empat hal yang tercakup dalam literasi kritis: (1) literasi kritis berfokus pada isu-isu kekuasaan (*power*) dan mementingkan refleksi, transformasi dan aksi; (2) literasi kritis berfokus pada problem dan kompleksitasnya; (3) strategi literasi kritis adalah dinamis dan beradaptasi pada konteks yang digunakan; (4) literasi kritis memeriksa dan mengevaluasi dari berbagai perspektif.

Literasi disini, kemampuan seseorang dalam memahami sebuah informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Mendidik masyarakat sejak dini untuk selalu bersikap skeptis dan kritis pada informasi bohong niscaya akan jauh lebih bermanfaat daripada semata hanya menekankan kasus penindakan hukumnya.

Pada saat di dunia maya terjadi ledakan atau bom informasi yang luar biasa pesat, para pengguna yang tidak didukung dan memiliki literasi kritis bukan tak mungkin terjebak dalam pusaran informasi yang sekadar hoaks, atau informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya (Kompas, 29/8/2017. Hal. 6). Literasi Kritis merupakan suatu pendekatan instruksional yang menganjurkan untuk adopsi perspektif secara kritis terhadap teks, atau dengan kata lain, jenis literasi yang satu ini bisa kita pahami sebagai kemampuan untuk mendorong para pembaca supaya bisa aktif menganalisis teks dan juga mengungkapkan pesan yang menjadi dasar argumentasi teks. (<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414143067.pdf>) Diakses Tgl. 19/6/2019.

Literasi kritis dimaksud, proses berfikir kritis terhadap informasi yang diperoleh. Istilah kritis yang melekat pada istilah literasi informasi sehingga menjadi literasi informasi dan kritis (LIK, atau dalam istilah asing *information and critical literasi*) memberikan penekanan kepada aspek criticality atau kemampuan untuk tidak mudah menerima, atau bersifat kritis terhadap informasi yang diterima dengan cara mengevaluasi informasi tersebut. Banyak literatur menampilkan istilah kritis ini sebagai bagian terpenting dari skill dalam literasi informasi. Sebagai contoh, Koltay menyebutkan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan elemen terpenting dalam mengakses, mengevaluasi, mengolah serta menggunakan informasi yang didapat. Secara

spesifik Koltay (2011) menyarankan pentingnya sikap kritis dalam mengevaluasi kualitas informasi dan sumber informasi.

Dalam pandangan Kellner dan Share (2003: 369), literasi disebutkan sebagai “berkaitan dengan perolehan keterampilan dan pengetahuan untuk membaca, menafsirkan dan menyusun jenis-jenis teks dan artifak tertentu, serta untuk mendapatkan perangkat dan kapasitas intelektual sehingga bisa berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat dan kebudayaan.” Artinya, dengan literasi orang bisa meningkatkan harkat, martabat dan perannya ditengah masyarakat. Literasi ini terkait dengan perolehan kompetensi-kompetensi yang saling terkait untuk belajar secara efektif dan secara sosial memanfaatkan bentuk-bentuk komunikasi serta representasi yang konstruksi.

Rendahnya literasi digital dan karakter otak kita yang malas bekerja keras itu diperparah dengan lemahnya kemampuan sebagian besar masyarakat Indonesia untuk berfikir kritis dan menoleransi mereka yang berusaha berpikir kritis. Dalam berfikir, masyarakat Indonesia masih dominan memakai emosinya yang ada di sistem *limbik otak*. Akibatnya, mereka memandang sesuatu secara hitam putih. Sementara kemampuan berpikir kritis memakai *korteks prefrontal* di otak bagian depan kurang terbangun. Dampaknya, kemampuan menganalisis informasi dan mengecek ulang sulit dilakukan. Dampak jauhnya, orang Indonesia jadi mudah dibohongi dan dimanipulasi.

Hoaks mudah menyebar karena cara kerja otak kita yang malas bekerja keras. Pada dasarnya manusia suka menyenangkan diri dan kelompoknya meski sadar itu bohong. Berita bohong mudah diterima otak karena itu menyenangkan.

Di sisi lain, otak manusia bekerja efisien. Jika tindakan dilakukan berulang, termasuk memproduksi dan menyebarkan berita bohong, otak akan memasukkan tindakan itu dalam otak bawah sadar. Artinya, tindakan berbohong akan menjadi perbuatan otomatis tanpa otak perlu mengeluarkan energi untuk memikirkannya kembali. Itulah membuat tindakan memproduksi dan menyebarkan berita bohong jadi hal biasa. Kebohongan yang dilakukan berulang lama-lama akan jadi kebenaran. Kebiasaan berbohong meluas sejak internet dan media sosial berbagai model muncul. Teknologi informasi memudahkan manusia berbohong dan menyebar kebohongan.

Penguatan pola pikir kritis itu diharapkan mampu mengatasi bias konfirmasi. Melawan hoaks dengan memperbanyak berita positif atau memblokir situs tertentu dinilai kurang efektif jika masalah dasarnya terkait cara kita berpikir tak diselesaikan. Kemampuan berpikir kritis itu kurang terbangun di pendidikan dan budaya Indonesia. Ketidakmampuan berpikir kritis itu membuat mereka sulit memecahkan masalah dengan tuntas. Rendahnya kemampuan berpikir kritis itu memperburuk mutu manusia Indonesia. Tanpa kekritisian, kemampuan berpikir kreatif untuk melahirkan inovasi yang merupakan kemampuan otak tertinggi

akan kian sulit. Budaya kita pun kurang menghargai mereka yang berusaha berpikir kritis. Mereka yang kritis kerap dianggap pengganggu, cerewet, dan tak sopan. (Kompas, 26/8/2017. Hal. 14).

E. Literasi Media

Kondisi masyarakat Indonesia yang plural terdiri dari berbagai suku bangsa yang hidup terpencar dan tersebar di ribuan pulau masih banyak yang diantara mereka berpendidikan rendah dan menyandang *media illiterate* (buta media) yang kurang mampu mengakses secara kritis terhadap media massa/konvensional maupun media baru (internet).

Prinsipnya *media literacy* adalah kemampuan yang efektif dan efisien untuk memahami dan pemanfaatan konten media massa atau *the ability to effectively and efficiently comprehend and utilize mass media content* (Baran, 2006:35). Khalayak media harus mengembangkan kemampuan atau memfasilitasi diri untuk menjadi penafsir isi media yang baik. Untuk apa media literasi dibangun? Hobbs menyimpulkan tujuan media literasi, antara lain: (1) penguatan akses terhadap informasi; (2) mendukung dan menumbuh kembangkan lingkungan pendidikan; (3) menginspirasi untuk mengembangkan akses terhadap berbagai sumber informasi (Hobbs, 1998:2).

O'Neill (2000:58) melihat adanya pergeseran dalam tujuan media literasi dari paradigm “proteksionis” yang bertujuan

melindungi dari berbagai pengaruh buruk media massa menjadi paradigma “kritis” yang berupaya memberdayakan masyarakat dengan menumbuhkembangkan kesadaran kritis dalam menikmati setiap sajian media massa. Sedangkan Baran mengemukakan beberapa elemen dari media literasi dengan cara menambahkan dua elemen dari lima elemen *media literacy* yang sebelumnya telah diidentifikasi Media Schooler Art Silverblatt (1995). Literasi media dibangun berdasarkan beberapa elemen diantaranya: (1) *An awareness of the impact of media*, kesadaran atas dampak media pada individu dan masyarakat; (2) *An understanding of the process of mass communication*, pemahaman pada proses komunikasi massa; (3) *Strategies for analyzing and discussing media messages*, strategi-strategi yang digunakan untuk menganalisis dan mendiskusikan pesan-pesan media; (4) *An understanding of media content as a text that provides insight into our culture and our lives*, pemahaman pada konten media sebagai sebuah teks yang memberi wawasan kedalam kultur dan kehidupan kita; (5) *The ability to enjoy, understand, and appreciate media content*, kemampuan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi konten media; (6) *An understanding of the ethical and moral obligations of media practitioners*, memahami tuntutan etika dan moral bagi para praktisi media; (7) *Development of appropriate and effective production skills*, mengembangkan kemampuan-kemampuan produksi secara memadai dan efektif.

Disisi lain, khalayak media diharapkan memiliki *skill* dalam menyimak isi media. Agar khalayak dapat memahami dan memperoleh manfaat positif konten media maka sebaiknya khalayak memiliki *skill* yang terkait dengan *media literacy*. Baran mengemukakan beberapa *skill* yang seharusnya dikuasai oleh khalayak pengguna media massa, diantaranya: (1) *The ability and willingness to make an effort to understand content, to pay attention, and to filter out noise*, kemampuan dan kemauan untuk berupaya memahami konten, memperhatikan secara seksama dan memfilter yang tidak baik; (2) *An understanding of and respect for the power of the media messages*, memahami dan mewaspadaai terhadap kekuatan dari pesan-pesan media; (3) *The ability to distinguish emotional from reasoned reactions when responding to content and to act accordingly*, kemampuan membedakan emosional dan reaksi yang beralasan ketika merespon konten dan tindakan terkait; (4) *Development of heightened expectations of media content*, mengembangkan ekspektasi-ekspektasi konten media yang ditinggikan; (5) *A knowledge of genre conventions and the ability to recognize when they are being mixed*, sebuah pengetahuan tentang “*genre*” dan kemampuan untuk mengenalinya ketika dicampurkan; (6) *The ability to think critically about media messages, no matter how credible their sources*, memiliki kemampuan berfikir kritis terhadap pesan-pesan media, sekalipun dari sumber-sumber yang sangat terpercaya; (7) *A knowledge of the internal language of various media and the*

ability to understand its effects, no metter how complex, memiliki pengetahuan tentang berbagai gaya bahasa dari berbagai macam media dan berkemampuan untuk mengerti berbagai efek yang ditimbulkannya, sekalipun begitu rumitnya (Baran, 2006: 42).

F. Kroscek Keaslian Berita

Apa yang bisa dilakukan warganet Indonesia untuk memberantas hoaks menghadapi tahun Pilkada 2018, yang bisa dilakukan antara lain dengan kroscek berita yang dibagikan rekan atau teman kita dari grup *chatting*, kalau bisa ditanyakan dari situs mana dan sejauh mana kebenarannya. Adapun cara-cara yang lain ialah dengan mengecek keaslian berita melalui situs yang direkomendasikan aparat berwenang untuk menghindari kesalahpahaman yang tidak diinginkan. Yang terakhir ialah jangan takut untuk melaporkan segala informasi hoaks kepada pihak yang berwajib. Cara inilah warganet Indonesia dapat melaporkan berita atau foto hoaks yang berseliweran yang menimbulkan kegaduhan-kegaduhan yang tidak diinginkan. Cara-cara seperti itu mungkin bisa terhindar dari bahaya laten hoaks yang terus membayangi kehidupan sosial bermasyarakat.

Membagikan informasi lewat media sosial memang harus dilakukan dengan lebih bijaksana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 11 Tahun 2008 yang sudah direvisi November 2016 mengokohkan posisi pemerintah untuk melakukan kontrol lebih ketat atas kebenaran informasi di media

sosial. Jika tidak hati-hati membuat atau menyebarkan berita, bisa saja harus berurusan dengan hukum.

Disinilah pentingnya gerakan penangkal hoaks, agar Indonesia memiliki dunia maya yang lebih sehat, bermanfaat serta berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemblokiran belumlah cukup, masyarakat juga ikut menjadi filter sebelum mendistribusikan kembali. Munculnya situs turnbackhoax.id (Masyarakat Indonesia Anti Hoax), aplikasi *mobile* Turnbackhoax (Masyarakat Telekomunikasi dan Informatika Indonesia), *netizen* bisa menyampaikan berita, informasi, bahkan *meme* dari media situs atau media sosial yang isinya hoaks. Masyarakat bisa memberikan penjelasan dan bukti sebuah informasi itu hoaks. Situs web dan aplikasi ini bisa menjadi rujukan dan referensi untuk mengetahui berita tersebut hoaks atau tidak dan bagaimana hoaks itu terbentuk.

Aplikasi Turn Back Hoax berbasis *crowdsource* ini didesain agar bisa menjadi basis data berita fitnah dan hoaks, yang dapat dijadikan rujukan oleh masyarakat untuk memverifikasi informasi. Basis data ini juga bisa dipakai untuk menganalisis pola-pola berita fitnah dan palsu, mengelompokkan topik-topik palsu, orang atau kelompok yang diserang, dan media yang digunakan. Untuk mengakses basis data berita fitnah dan palsu, masyarakat bisa membuka data.turnbackhoax.id menggunakan mesin perambah Safari, Chrome, dan Firefox.

Pada jejaring sosial Facebook, muncul gerakan pemberantasan berita palsu di *fanpage* Indonesian Hoaxes Community (IHC). Di grup yang beranggotakan 39.532 akun ini, siapa pun bisa saling bertanya dan mengklarifikasi informasi apapun berita yang tidak jelas (Kompas, 7/2/2017. Hal. 1). Dalam grup terbuka tersebut terdapat 16 butir aturan yang mesti dipatuhi anggotanya, antara lain dilarang berkomentar tidak santun, dilarang berdiskusi mengenai keyakinan agama atau ideologi, dilarang membawa apa pun keluar dari grup, dilarang berdiskusi yang menyerang secara pribadi, serta argumen dan analisis harus disertai bukti valid.

Laman Facebook Forum Anti Fitnah dan Hoax Indonesia (FAFHI) berupaya memotivasi *netizen* agar gemar memverifikasi kabar yang sering mereka temui di dunia maya. Anggota bebas mengunggah verifikasi hoaks disertai rujukan-rujukan yang valid.

Pusat-pusat informasi anti hoaks mempunyai semangat, agar masyarakat memiliki kesadaran untuk tidak menyebarkan hoaks, serta mendorong masyarakat untuk terbiasa mencari kebenaran dari informasi yang mereka terima.

Pemberian *barcode* untuk media yang sudah terverifikasi sehingga masyarakat bisa membedakan media yang baik dengan media abal-abal yang kerap menyebarkan berita hoaks, akan menjadi penting adanya.

G. Filter Bubble dalam Sistem Media Sosial

Filter *bubble* ialah sistem yang dikemukakan oleh Pariser (2011) untuk menggambarkan fenomena penjarangan informasi yang dapat diterima yang disesuaikan dengan apa yang disukai berdasarkan pola yang dibuat dengan cara sadar atau tidak sadar. Ketika *like*, *share*, *send*, atau *click* sebenarnya sistem media sosial akan mencoba mendeskripsikan siapa diri kita dan secara acak akan mencari informasi yang sesuai dengan kepribadian kita. Banyak kajian kritis yang melihat fenomena ini sebagai sesuatu bentuk pemaksaan kehendak dari sebuah sistem. Arti dari filter bubble adalah sebuah kondisi hasil formulasi hitungan perkiraan algoritma penyaringan pada sebuah situs yang akan menebak info apa saja yang kira-kira pengguna tersebut ingin lihat. Formulasi ini berdasarkan informasi aktifitas terakhir tentang pengguna seperti lokasi, riwayat klik, riwayat like, pertukaran komentar, dan riwayat pencarian sebagai hasilnya, pengguna menjadi tersingkir dari berbagai macam informasi yang tidak selaras dengan pandangan mereka. (https://www.adhit.net/2016/12/waspada-bahaya-efek-filter-bubble-di_3.html). Dikutip, 21/6/2019.

Kita tidak pernah diberitahu ketika suatu informasi dipilih dan tidak dipilih untuk disajikan kepada kita, padahal seharusnya sebagai pribadi yang merdeka kita bebas memilih informasi apa yang patut kita terima. Akibatnya ialah informasi yang kita terima akan berputar-putar dalam lingkaran *bubble*. Hal yang lebih parah ialah ketika informasi yang kita terima merupakan hasil pemilihan

informasi dari algoritma *bubble* di media sosial, dikhawatirkan akan membentuk sudut pandang kita dan akhirnya informasi tersebut menjadi kebenaran dalam otak kita dan nilai yang kita yakini selama ini.

Jadi, jangan terlalu merasa paling benar ketika berdebat walaupun menggunakan data-data yang didapat di media sosial atau internet karena bisa jadi informasi yang diterima sebenarnya merupakan pembenaran otak kita dalam mengonstruksi hasil sajian informasi dari *bubble* atau oleh Jean Baudrillard (1981) disebut sebagai *hyperreality*.

Globalisasi melalui perangkat gawai dan internet sudah menjadikan dunia baru untuk manusia saling berinteraksi seolah-olah kita memiliki dunia kedua selain dunia nyata saat ini. Cara termudah untuk keluar dari *bubble* ini, selain bijak dalam penggunaan media sosial dan sadar bahwa kita ialah produk yang diawasi, menurut Pariser (2011) ialah dengan menyabotase personalisasi, seperti menghapus *cookies*, menghapus riwayat pencarian, menggunakan mode penyamaran, memilih informasi-informasi yang tidak biasa sehingga akan mengacaukan pola yang terekam sistem. Semoga setelah ini kita sadar bahwa aktivitas kita selama ini tidak lepas dari ‘pengawasan’ media sosial. Literasi memang penting, tetapi tanpa mengetahui apa yang sebenarnya kita hadapi akan sulit untuk membuat diri kita menjadi netizen yang benar-benar bersih mendapatkan informasi yang akurat dan kredibel (Media Indonesia, 26/3/2018. Hal. 9).

III. PENUTUP

Literasi media bermanfaat menjadikan individu melek media. Dalam arti menjadi pribadi yang paham akan media, berpengetahuan luas, mampu menganalisis informasi, mengevaluasi, dan mampu berpendapat secara kritis atas informasi media yang didapat. Sehingga individu dapat senantiasa mengambil sikap atas sebuah informasi tertentu secara bijak dan tidak mudah hanyut dalam pembentukan opini yang bersifat negatif. Literasi media merupakan perangkat perspektif dimana individu secara aktif memberdayakan dirinya sendiri dalam menafsirkan informasi yang diterima dan bagaimana cara mengantisipasinya.

Post truth berkaitan dengan kondisi dan situasi dimana pengaruh ketertarikan emosional dan kepercayaan pribadi lebih tinggi dibandingkan data dan fakta yang obyektif dalam pembentukan opini publik. Berita atau informasi yang disampaikan, meskipun menjanjikan sesuatu, belum tentu dapat dikatakan suatu kebenaran. *Post truth* sengaja dikembangkan dengan tujuan tertentu sehingga bagi yang kurang kritis terhadap informasi yang didapat akan dengan mudah terpengaruh yang diwujudkan dalam bentuk empati dan simpati terhadap agenda isu tertentu yang sedang diskenariokan.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Stanley J. 2006. *Introduction to Mass Communication, Media Literacy and Culture*, McGraw Hill, New York.
- Bertelsman Foundation & AOL Time-Warner Foundation. 2002. *White Paper: 21st Literacy in a Convergent Media World*. Gutersloch: Bertelsman Foundation.
- Chaplin, R. 1981. *Perkembangan Intelektual Anak*. Jakarta: Erlangga.
- Hagan, Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Hobbs, R. 1998. *Building Citizenship Skill through Media Literacy Education* dalam Salvador, M & Sias, P (ed), *The Public Voice in a Democracy at Risk*, Westport, CT: Praeger Press.
- Hobbs, R. 1998. “The Seven Debates in the Media Literacy Movement” dalam *Journal of Communication* Vol 48 No. 1/1998 hlm. 16-32.
- Kellner, D., dan Share, J. 2003. Toward “Critical Media Literacy: Core Concepts, Debates, Organizations, and Policy” dalam *Discourse: Studies In the Cultural Politics Of Education* Vol. 26, No.3, September 2005, hlm. 369-386.
- Koltay, Tibor.2011. *The Media and the Literacies: Media Literacy, Information Literacy, Digital Literacy. Media, Culture & Society*, 33(2), 211-21.
- O’Neill, B. 2000: *Media Education in Ireland: An Overview* dalam *Irish Communication Review* Vol 8 hlm 57-64.
- Poloma. 2004. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Santoso dan Zulfa. 2013. *Kriminologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Varis, T. 1997. *Communication Competence and the Information Society*.

Referensi Surat Kabar

- Kompas, 6/2/2017. Hal 5.
Kompas, 7/2/2017. Hal. 1.
Kompas, 26/8/2017. Hal. 14.
Kompas, 29/8/2017. Hal. 6.
Kompas, 24/3/2018. Hal. 4.
Kompas, 28/4/2018. Hal. 7.
Koran Sindo, 27/2/2017, Hal. 3.
Media Indonesia, 10/11/2017. Hal. 22.
Media Indonesia, 1/3/2018. Hal. 6.
Media Indonesia, 3/3/2018. Hal. 2.
Media Indonesia, 12/3/2018. Hal. 4.
Media Indonesia, 26/3/2018. Hal. 9.
Media Indonesia, 9/4/2018. Hal. 8.
Media Indonesia, 10/4/2018. Hal. 8.

Referensi Internet

- (<http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-kontrol-sosial-atau-social-control>). Diakses, Tgl 13/6/2018.
(<http://digilib.uinsby.ac.id/3892/4/Bab%202.pdf>). Diakses, Tgl 14/6/2019.
(<https://jihannabillanet.wordpress.com/2016/06/26/perkembangan-intelektual/>). Diakses, Tgl 17/6/2019.
(<https://teknologi.bisnis.com/read/20180914/105/838292/penelitian-facebook-saluran-tertinggi-penyebaran-hoax>). Diakses Tgl 18/6/2019.
(<http://ksp.go.id/media-sosial-post-truth-dan-literasi-digital/index.html>). Diakses, Tgl. 18/6/2019.
(<http://sc.syekhnurjati.ac.id/esscamp/risetmhs/BAB21414143067.pdf>). Diakses Tgl. 19/6/2019.
(https://www.adhit.net/2016/12/waspadai-bahaya-efek-filter-bubble-di_3.html). Dikutip, 21/6/2019.